

ABSTRAK

Penempatan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam jabatan sipil merupakan isu penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Hal ini melibatkan pengaturan hukum yang kompleks untuk menjamin keseimbangan antara profesionalisme TNI dan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Penelitian ini membahas pengaturan pengisian jabatan sipil oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Undang-Undang TNI. Meskipun terdapat batasan, prajurit TNI dapat menduduki jabatan tertentu di instansi pemerintah, namun harus memenuhi syarat kualifikasi dan tidak dapat beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama masih aktif. Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dan kebijakan terkait pengisian jabatan sipil oleh TNI serta dampaknya terhadap reformasi birokrasi dan prinsip demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian jabatan sipil oleh personel TNI diatur dalam sejumlah regulasi yang memberikan syarat dan batasan tertentu. Namun, implementasi pengaturan tersebut sering kali menimbulkan perdebatan terkait independensi pemerintahan sipil, potensi politisasi TNI, dan pelanggaran prinsip netralitas.

Kata Kunci: Tentara Nasional Indonesia, jabatan sipil, supremasi sipil, netralitas, pengaturan hukum.

ABSTRACT

The placement of Indonesian Armed Forces (TNI) personnel in civilian positions is an important issue in Indonesia's governance system. It involves complex legal arrangements to ensure a balance between TNI professionalism and democratic governance. This research discusses the regulation of filling civilian positions by the Indonesian National Army (TNI) based on Government Regulation No. 11/2017 and the TNI Law. Although there are restrictions, TNI soldiers can occupy certain positions in government agencies, but must meet qualification requirements and cannot change their status to Civil Servants (PNS) while still active. This study analyzes the legal and policy implications related to the filling of civilian positions by the TNI and its impact on bureaucratic reform and democratic principles in Indonesia. The results show that the filling of civilian positions by TNI personnel is regulated in a number of regulations that provide certain requirements and restrictions. However, the implementation of these arrangements often raises debates regarding the independence of civilian government, the potential politicization of the TNI, and violations of the principle of neutrality.

Keywords: *Indonesian National Army, civilian positions, civilian supremacy, neutrality, legal arrangements.*